

INTISARI

IMPLEMENTASI SISTEM MERIT DALAM PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) MELALUI SELEKSI TERBUKA “*OPEN BIDDING*” DI SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA

Oleh:

Maura Andarani¹, Rizky Septiana Widyaningtyas².

Penelitian ini memiliki 2 (dua) tujuan yang hendak dicapai, yaitu untuk mengetahui implementasi sistem merit telah terlaksana terhadap proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi melalui seleksi terbuka atau *open bidding* serta kendala yang menghambat dalam proses pelaksanaannya pada Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam Penulisan Hukum ini bersifat normatif-empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer diperoleh dengan teknik wawancara yang mendalam dengan pihak Kepegawaian Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, pengumpulan data sekunder diperoleh dari studi pustaka dengan mempelajari berbagai peraturan perundangan dan teori hukum terkait. Analisa pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisa data kualitatif yang disusun secara deskriptif untuk mencapai tujuan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Sistem Merit dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Melalui Seleksi Terbuka “*Open Bidding*” di Sekretariat Kabinet Republik Indonesia telah diterapkan. Hal ini dapat dilihat dari proses rekrutmen Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretariat Kabinet Republik Indonesia telah dilakukan secara terbuka. Namun dalam pelaksanaannya masih kurang efektif dan efisien dilihat dari kurangnya peminat Pejabat dari banyaknya Peserta dari luar Sekretariat Kabinet yang tidak memenuhi persyaratan serta hambatan-hambatan yang dihadapi ialah terdapat beberapa aturan yang tidak dipenuhi oleh panitia seleksi terbuka yaitu tidak adanya wadah komunikasi antara peserta dan bagian administrasi pelaksanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui seleksi terbuka dan penundaan waktu pelaksanaan tahapan seleksi terbuka.

Kata kunci: Sistem Merit, Seleksi Terbuka, Pengisian Jabatan pimpinan Tinggi

¹ Mahasiswa Strata Satu (S-1) pada Departemen Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

² Staf Pengajar Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF MERIT SYSTEMS IN THE FILLING OF POSITION OF HIGH LEADER (JPT) PRATAMA THROUGH OPEN SELECTION AT SECRETARIAT OF CABINET OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

By: Maura Andarani¹, Rizky Septiana Widyaningtyas².

This research has aims to reach 2 (two) objectives, which are to cognize the implementation of merit systems have been implemented in the filling of High Leader (JPT) Pratama through open selection and the factors that hindered the implementation process at The Secretariat of Cabinet of The Republic of Indonesia.

The research method used in this writing of the legal research is normative-empirical. The type of data uses are primary data and secondary data. The primary data collection was obtained by deep interview technique with Employee Affair of The Secretariat of Cabinet of The Republic of Indonesia, the secondary data collection was obtained from literature study by learning from various laws and related legal theories. The analysis in this research is done by using qualitative data analysis which is descriptively developed to reach the research objectives.

The results showed that the implementation of Merit system in the filling of High Leadership Department (JPT) through open selection "Open Bidding" in the Cabinet secretariat of the Republic of Indonesia has been applied. This can be seen from the recruitment process of the primary leadership Department of the Cabinet Secretariat of the Republic of Indonesia has been conducted openly. But in the implementation is still less effective and efficient judging by the lack of fan officials of the number of participants from outside the Cabinet Secretariat who do not meet the requirements and the obstacles faced are there are several rules that is not fulfilled by the Open Selection committee i.e. the absence of communication between participants and the administrative section of the primary High leadership department through open selection and time delay implementation of open selection stage.

Key word: Merit Systems, Open Selection, High Leader (JPT).

¹ Undergraduate Student of Administrative Law Department at Faculty of Law Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

² Lecturer of Administrative Law Department at Faculty of Law Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.